



Media: Tribun Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 05 Mei 2020

Halaman: 1

DIY Masih Jauh dari PSBB

SEKDA DIY, Kadamanta Baskara Aji menyebut, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY masih menelaah penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Jika diterapkan di DIY, maka butuh kesiapan masyarakat dan juga pemda setempat.

"Memang PSBB yang bisa diterapkan adalah satu provinsi karena ada jalan masuk tertentu. Hanya kemudian ekonomi harus lumpuh betul. Dengan diterapkan PSBB, maka harus ada pembatasan jam malam, dan juga penegakan hukum harus benar-benar dilakukan, ini menjadi problematik," ujar Aji saat ditemui *Tribun Jogja*, kemarin siang.

Dia menyebut, kriteria untuk menerapkan PSBB pun belum seperti di daerah lain, meski angka warga yang positif Covid-19 mencapai 115 orang. Menurutnya, tren di DIY penambahan kasus positifnya tidak terlalu cepat.

"Kami tetap bersama-sama slapkan telaah (PSBB). Tapi, ya, itu tadi ekonomi lumpuh, kaya dan miskin harus dibenarkan penghidupan. Dengan PSBB harus ada sembako di depan pintu," ujarnya.

● ke halaman 11

DIY Masih Jauh dari

● Sambungan Hal 1

Menurut pengamatannya, kondisi Jogja memang ramai pada saat jam kerja. Namun di akhir pekan seperti Sabtu malam di kawasan Malioboro dan Alun-Alun Keraton sudah sepi. "Saya kira masyarakat sudah disiplin," ujarnya.

Aji menguraikan, akan selalu ada kemungkinan untuk mengajukan/menerapkan PSBB. Namun keputusan tersebut tidak bisa diambil sepihak. Kabupaten/kota beserta Forkompida harus duduk bersama. Selain itu, belum tentu tujuan PSBB langsung disetujui Kementerian Kesehatan. "Kalau tidak ada peningkatan yang signifikan dari *rapid test*, tentu kita masih pada status Tanggap Darurat," ucapnya.

Mantan Kepala Disdikpora DIY ini menambahkan, PSBB tidak harus diberlakukan penuh satu provinsi. Namun melihat kondisi geografis DIY, akan cukup sulit untuk melakukan PSBB per wilayah kabupaten/kota. Pasalnya mobilisasi warga antarkabupaten/kota sangat tinggi tiap harinya.

"Kalau Gunungkidul dibatasi, orang jalan kaki ke Gunungkidul juga gampang. Apalagi Sleman dan kota (Yogyakarta), wong omah Sleman makan (kerja) di kota. Kayaknya enggak mungkin kalau di DIY ada PSBB kabupaten/kota," ucapnya.

Disinggung mengenai kesiapan anggaran ketika DIY menerapkan PSBB, Aji mengatakan bahwa itu tidak bisa diputuskan sepihak. Pihak pemerintah pusat akan mengundang Pemda DIY untuk membicarakan hal tersebut.

"Kita susah menjawab. Saya punya APBD Rp5 triliun sekian. Tapi kalau dari pusat datang. Kalau saya menyebutkan Rp5,5 triliun kalau dari Jakarta enggak datang berarti cuma pajak sehari saja cuma Rp2 miliar. Kita harus rimbun dengan kemenkes, kemenkeu, kemendagri, dan daerah," bebernya.

Sementara itu, tindak lanjut dari SE Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY, tiga kabupaten diminta untuk melakukan *rapid test* massal yakni Sleman, Bantul, dan Gunungkidul. Aji mengatakan sudah ada beberapa *Haaster* penularan yang cukup banyak di DIY.

"Beberapa hari ini kan penambahannya banyak. Oleh karena itu kemudian Pak Wabup selaku Ketua Gugus Tugas membuat surat kepada Ketua Gugus kabupaten untuk *rapid test* massal untuk kita mengetahui dengan cepat sejauh mana penularan itu terjadi di kabupaten kota. Terutama di wilayah-wilayah yang sampai generasi 3," urainya, Senin (4/5).

Dia mengungkapkan, mereka yang telah menjalani *rapid test* dan hasilnya reaktif, bisa segera mendapatkan perawatan. Pasalnya, Aji menyebut bahwa saat ini banyak ditemukan OTG yang sebenarnya positif dan membutuhkan pengobatan, tapi karena tidak ada keluhan apa pun tetap beraktivitas seperti biasa.

Terkait ketersediaan jumlah *rapid test kit*, Aji menyampaikan bahwa keperluan tersebut sudah diberikan ke kabupaten/kota sebelumnya, yakni bantuan dari pusat yang dibagikan untuk tenaga medis yang hingga saat ini belum habis. "Nanti kabupaten/kota yang kurang, silahkan menghubungi ke dinas kesehatan untuk diberikan tambahan. Masih sisa berapa, kebutuhannya berapa, kita penuh," ucapnya.

Prosedur untuk pelaksanaan *rapid test* tersebut, Pemda DIY telah meminta agar petugas bisa menyelenggarakan *rapid test* massal tanpa ada kenunanan. "Saya kira dijadwal saja bisa datang ke puskesmas. Nanti Pak RT yang akan mengatur jadwalnya. Kita buat antisipasi waktu saja, satu orang diambil *rapid test* butuh waktu berapa lama. Bisa juga dilakukan jemput bola," ucapnya.

Hasil *tracing*, lanjutnya, menjadi prioritas. Pihaknya juga melakukan perluasan wilayah untuk mereka yang tidak melakukan kontak secara langsung. "Tracing pertama orang positif. Jangan sampai anak-anaknya tidak di-*rapid*. Tetangganya juga, kita kembalikan ke situ," pungkas Aji.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudianto mengatakan, pihaknya sudah tidak mentoleransi langkah Pemda DIY dalam keputusan penanganan Covid-19. Menurutnya, sejak awal pemerintah daerah sudah kalah start dengan Covid-19. Dampaknya, penanganan saat ini menjadi tidak maksimal. "Kalah start dengan si Covid. Karena pencegahan masih minimalis. Harus lebih tegas lagi, bila perlu semua anggaran buat bayarin aparat untuk memperketat protokol kesehatan," katanya, Senin (4/5). (als/kur/hda)

MM 005

1.	ik Lanjut
2.	Ditanggapi
3.	Diketahui
4.	Pers
5.	

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005